



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG**

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN COVERi

DAFTAR ISIii

DAFTAR TABELiii

DAFTAR GAMBARiv

KATA PENGANTARv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang I-6

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok & Fungsi..... I-7

1.3 Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan UtamaI-11

1.4 Landasan Hukum..... I-12

1.5 Sistematika I-14

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis II-15

2.2 Rencana Kinerja II-17

2.3 Perjanjian Kinerja II-18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi III-22

3.2 Realisasi Anggaran III-37

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan dan Saran IV-42

4.2 Strategi Untuk Meningkatkan Kinerja IV-42

4.3 Inovasi Yang Dilakukan..... IV-43

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja 45

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	II-17
Tabel 2. 2 : Tujuan dan SasaranDinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023	II-17
Tabel 2. 3 : Program Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Tahun 2023	II-18
Tabel 2. 4 : Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023	II-19
Tabel 2. 5 : Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023	II-20
Tabel 3.1 : Hasil Pengukuran Kinerja Terhadap Tujuan dan Sasaran Tahun 2023.....	III-23
Tabel 3.2 : Capaian Target Kinerja Tahun 2023.....	III-24
Tabel 3.3 : Perbandingan target, realisasi Capaian tujuan Tahun 2021, 2022, 2023.....	III-25
Tabel 3.4 : Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya	III-25
Tabel 3. 5 : Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya.....	III-26
Tabel 3. 6 : Program dan Indikator Penunjang.....	III-27
Tabel 3.7 : Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	III-30
Tabel 3.8 : Realisas Anggaran Program dan KegiatanDinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023	III-38

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 : Struktur Dinas / BadanI-7

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Alloh SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Rembang Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rembang, bahwa Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Rembang mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi lain, laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2021.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Rembang melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Strategis 2021-2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Rembang, Januari 2024

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG



MUCH SOFYAN CHOLID
Pembina Tk. 1
NIP. 196607291993031004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai Permen PAN dan RB RI nomor 53 Tahun 2014, bahwa setiap perangkat daerah diwajibkan melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, dan menyampaikan Laporan Kinerja pada setiap akhir tahun paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

SAKIP merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi. SAKIP terdiri dari komponen – komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pencapaian kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Oleh karena itu, setiap lembaga wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Selain itu, LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik. Dalam persepektif yang lebih luas, LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok & Fungsi

A. Struktur Organisasi

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rembang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretariat :
 - 2.1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - 2.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 3. Bidang Kenelayanan ;
- 4. Bidang Bina Usaha dan Peningkatan Daya Saing;
- 5. Bidang Perikanan Budidaya;
- 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan;
- 7. Kasubbag Tata Usaha;
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar I.1
Bagan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- f. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Kelautan dan Perikanan dibagi dalam 1 sekretariat, 3 bidang dan 1 UPTD. Tugas pokok sebagai berikut:

1. Sekretariat

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi program, keuangan, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;
- c. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;

- d. pengoordinasian penyusunan produk hukum di lingkungan Dinas;
- e. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Bidang Kenelayanan

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Kenelayanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan produksi dan sarana prasarana kenelayanan serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan produksi dan sarana prasarana kenelayanan serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan produksi dan sarana prasarana kenelayanan serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Perikanan Budidaya

Dalam melaksanakan tugas pokoknya bidang perikanan budidaya menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan produksi budidaya;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan sarana dan prasarana budidaya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan budidaya dan produksi garam serta sarana dan prasarana budidaya; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Bina Usaha dan Peningkatan Daya Saing

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Bina Usaha dan Peningkatan Daya Saing menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pengolahan dan peningkatan daya saing serta kemitraan dan pemasaran produk perikanan;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pengolahan dan peningkatan daya saing serta kemitraan dan pemasaran produk perikanan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengolahan dan peningkatan daya saing serta kemitraan dan pemasaran produk perikanan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

C. Sumber Daya Manusia

Jumlah personel untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Tahun 2023 adalah sebanyak 38 orang dengan perincian sebagai berikut :

- 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal :
 - a. Pendidikan Pasca Sarjana 2 Orang
 - b. Pendidikan Sarjana 24 Orang
 - c. Pendidikan D 4 - Orang
 - d. Pendidikan D 3 3 Orang
 - e. Pendidikan Sekolah Menengah Umum 8 Orang
 - f. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1 Orang
- 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan dan Jabatan :

Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Golongan :

 - a. Golongan IV 5 Orang
 - b. Golongan III 27 Orang
 - c. Golongan II 6 Orang
 - d. Golongan I 0 Orang

3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan / Eselon

a.	Eselon II	1	Orang
b.	Eselon III	4	Orang
c.	Eselon IV	4	Orang
d.	Fungsional	7	Orang
e.	Pelaksana	22	Orang

1.3 Aspek Strategis & Permasalahan Utama

Isu - isu strategis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisis dokumen terkait sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya produksi perikanan budidaya yang cenderung menurun akibat dampak Covid19;
2. Belum optimalnya produksi perikanan tangkap dan menurunnya daya dukung dan kerusakan ekosistem pesisir (mangrove, terumbu karang dan padang lamun);
3. Belum optimalnya peningkatan nilai tambah pengolahan hasil perikanan.

Permasalahan utama Dinas Kelautan dan Perikanan yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat kelautan dan perikanan di Kabupaten Rembang, adalah sebagai berikut :

1. Pemantapan kedaulatan pangan melalui peningkatan produksi perikanan (tangkap, budidaya dan garam), perbaikan sistem distribusi, ketersediaan sarana dan prasarana;
2. Masih tingginya resiko usaha dan belum adanya jaminan usaha kelautan dan perikanan;
3. Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan dan jaminan keamanan pangan;
4. Menurunnya daya dukung dan kerusakan ekosistem pesisir (mangrove, terumbu karang dan padang lamun).

Tahun 2023 fokus utama di masa pasca pandemik adalah pemulihan ekonomi, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, melalui penguatan ketahanan pangan dan infrastruktur, penguatan jaminan usaha, korporasi nelayan, pembangunan infrastruktur pendukung, penguatan kewirausahaan dan usaha mikro kecil dan menengah dengan memberikan stimulus, mengimplementasikan jaring pengaman sosial untuk nelayan dan pekerja sektor perikanan.

Penggunaan teknologi digital dalam membantu distribusi produksi dan meningkatkan logistik perikanan. Upaya penanganan dampak pandemi covid-19 di sektor kelautan dan perikanan diantaranya :

1. Pendataan untuk Produksi perikanan (tangkap dan budidaya dan pengolahan).
2. Penguatan akses pemasaran hasil produksi perikanan.
3. Perluasan penerima manfaat untuk kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Ikan (Gemarikan).
4. Perlindungan kepada nelayan melalui Hibah uang dan barang.
5. Pendampingan dan pembinaan rutin kepada pelaku utama sektor kelautan dan perikanan
6. Pelayanan pemberian rekomendasi subsidi BBM untuk nelayan kecil

1.4 Landasan Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Tahun 2022 disusun berlandaskan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; LKJIP 2023 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata I-9
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022;
11. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang.
12. Peraturan Bupati Kabupaten Rembang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang

1.5 Sistematika

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Rembang, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Rembang untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dinas kelautan dan perikanan provinsi jawa tengah sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja dinas kelautan dan perikanan provinsi jawa tengah sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Rembang untuk meningkatkan kinerjanya. Lampiran:

- 1) Perjanjian kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Berdasarkan RPJMD 2021 – 2026 dan rencana strategis (RENSTRA) dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Rembang tahun 2021 – 2026, renstra adalah sebuah dokumen perencanaan lima tahunan yang akan dijadikan acuan bagi perencanaan tahunan selama kurun waktu tahun 2021 – 2026.

Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan memiliki permasalahan yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan dan ketahanan pangan. Penentuan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Rembang menjadi awal dalam merumuskan isu-isu strategis. Isu-isu strategis tersebut akan sangat membantu dalam merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan 5 (lima) tahun ke depan. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pun akan lebih reliable dengan berdasar pada identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kelautan Dan Perikanan.

1. Visi

Visi dari Kepala Daerah Kabupaten Rembang yang merupakan visi Pemerintah Kabupaten Rembang periode tahun 2021 – 2026 yaitu “Terwujudnya Rembang Gemilang 2026“. Adapun maksud visi tersebut adalah menggambarkan suatu semangat mewujudkan masyarakat Kabupaten Rembang yang sejahtera dari segi ekonomi, melalui pembangunan pertanian dan industri, serta rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat dengan proteksi jaminan sosial yang baik dan mendapatkan pelayanan birokrasi yang prima, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan berkembangnya kehidupan demokrasi, dan saling tenggang rasa yang ditopang dengan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih mandiri.

2. Misi

Dari visi tersebut diatas, diturunkan dalam beberapa misi. Misi yang terkait langsung dengan pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Rembang adalah misi ke – 3, yaitu Membangun Infrastruktur dan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.

3. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang, memecahkan permasalahan yang dihadapi, dan menangani isu strategis daerah yang ada. Tujuan harus bersifat realistis dan dapat dicapai.

Tujuan dalam Renstra ini diartikan sebagai sesuatu yang akan dicapai dan merupakan penjabaran dari pokok-pokok misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

Tujuan yang harus dicapai dinas kelautan dan perikanan kabupaten rembang adalah “Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Unggulan dan Investasi Terhadap Ekonomi Daerah” dengan indikator Meningkatkan Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 2,1 %.

4. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, sehingga tujuan dapat dijabarkan lebih dari satu sasaran.

Sasaran yang ditetapkan dalam renstra Dinas Kelautan Dan Perikanan Tahun 2021 – 2026 adalah “Meningkatkan Produksi Perikanan” dengan indikator meningkatnya Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan sebesar 1%.

Tujuan dan sasaran serta indikator dan targetnya diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan dan investasi terhadap ekonomi daerah		Meningkatnya Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	1,9	2,1	2,3	2,5	2,7
		Meningkatkan Produksi Perikanan	Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan	%	1	1	1	1	1

2.2 Perencanaan Kinerja

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang dalam mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026 aadalah “ Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Unggulan dan Investasi Terhadap Ekonomi Daerah”

Sedangkan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang dalam mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 adalah “Meningkatnya Produksi Perikanan”

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan untuk tahun 2023 terdapat pada tabel 2.2

Tabel 2. 2
 Tujuan dan Sasaran
 Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2023
1	Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan dan investasi terhadap ekonomi daerah		Meningkatnya Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	2,1
		Meningkatnya Produksi Perikanan	Prosentase Produksi Perikanan	%	1

Untuk mencapai target tersebut diatas maka disusun perencanaan dengan menuangkan kedalam 4 Program Dinas Kelautan Dan Perikanan seperti disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2. 3
Program Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang
Tahun 2023

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM OPD Dinlutkan	Angka	75,5
		Nilai SAKIP OPD Dinlutkan	Angka	71,5
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Produksi Perikanan Tangkap	%	0,5
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	1,25
4	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Perikanan	%	1,25

2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja kegiatan tahunan, sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Di dalamnya ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Penyusunan ini seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan guna mendorong tercapainya sasaran-sasaran yang diharapkan dapat tercapai tahun 2023.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kerja pegawai (SKP).

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dan Kabupaten Rembang Tahun 2023, secara lengkap **tercantum pada Lampiran 1.**

Tabel 2. 4
 Perjanjian Kinerja
 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang
 Tahun 2023

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Unggulan dan Investasi Terhadap Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,1%
	Sasaran : Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan	1,0%

Untuk mewujudkan target yang telah dituangkan dalam perjanjian kinerja di Tabel 2.4, Dinas Kelautan dan Perikanan menyusun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 dan dituangkan ke dalam 4 (Empat) program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, ProgramPengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, kemudian dijabarkan ke dalam 13 kegiatan (tiga belas kegiatan) kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Rembang sebesar Rp. 15.286.252.372,- (Lima belas juta dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah), dengan komposisi : Anggaran pendukung langsung pencapaian Sasaran Strategis sebesar Rp. 7.480.430.100,- dan anggaran pendukung tidak langsung (administrasi perkantoran) sebesar Rp. 7.805.822.272,-.

Masing-masing program dijabarkan lebih lanjut ke dalam uraian kegiatan indikator hasil kinerja dan rencana tingkat capaian (target).

Tabel 2.5
Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Rembang Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				15.286.252.372
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				15.286.252.372
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM OPD DINLUTKAN	75,5	7.805.822.272
		Nilai SAKIP OPD DINLUTKAN	71,5	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	85	11.480.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	85	3.503.288.372
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	% Dokumen Penatausahaan BMD Dengan Kualitas Baik	85	1.375.000
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%pengadministrasian layanan Kepegawaian	80	1.200.000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	% pemenuhan pelayanan umum	100	124.146.100
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Pelayanan Penunjang Perkantoran	100	4.099.827.000
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	85	64.505.800
II	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pertumbuhan Produksi perikanan tangkap	0,5	5.373.533.100
1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	% Sarana dan prasarana perikanan tangkap dalam kondisi baik	25	4.225.000.000
2	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pertumbuhan Kelas Kelompok Nelayan	9,74	681.678.500
3	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Kenaikan Nilai raman (Rp)	0,5	466.854.600
III	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pertumbuhan produksi perikanan budidaya	1,25	886.805.000
1	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	% Kenaikan Kelas Pokdakan, Kugar	1,25	12.000.000
2	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	% prasarana pembudidayaan ikan dan garam dalam kondisi baik	25	874.805.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5
IV	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Pertumbuhan Produksi Hasil Olahan Perikanan	1,25	1.220.092.000
1	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Persentase cakupan Data Pengolahan Perikanan	85	1.394.500
2	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah produk pengolahan perikanan yang bersertifikat	18	124.134.000
3	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Angka Konsumsi Ikan	43,7	1.094.563.500

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah dan peraturan presiden nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, laporan kinerja instansi pemerintah dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah, setiap instansi wajib menyusun laporan kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakan.

Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan Dan Perikanan ini disusun guna mengukur atau untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam program, kebijakan, sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati Rembang sebagaimana tertuang dalam dokumen rencana strategis 2021 – 2026. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan Dan Perikanan ini menyajikan capaian kinerja setiap sasaran, pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKjIP) menyajikan capaian setiap sasaran juga capaian kinerja kegiatan tahun 2023. Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap kegiatan/proyek meliputi Indikator masukan (*Input*), keluaran

(*Output*), hasil (*Outcome*), manfaat (*Benefit*) dan dampak (*Impact*).

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Sangat Baik : > 100%;

Baik : 85 – 100%;

Cukup : 65 – 84,99%;

Kurang : 50 - 64,99%;

Sangat Kurang: < 50, %

Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang diukur berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2023 yang telah disepakati Kepala OPD dan Kepala Daerah yang tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai strategi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penghitungan pencapaian target dalam pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut :

Realisasi Tahun 2023

Target Tahun 2023

Tabel. 3.1

Hasil Pengukuran Kinerja Terhadap Tujuan dan Sasaran
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Tahun 2023

NO	TUJUAN /SASARAN	NILAI CAPAIAN KINERJA (%)
1	Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan dan investasi terhadap ekonomi daerah	101,9%
2	Meningkatkan Produksi Perikanan	-349%
Rata-rata		-123,5

Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan dan investasi terhadap ekonomi daerah

Tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan indikator Meningkatnya Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan satu indikator yang tidak dapat dihitung terpisah jadi Dinas Kelautan dan Perikanan mengampu indikator yang bersamaan dengan indikator Dinas Pertanian dan Pangan.

Tabel 3.2

Pencapaian Target Kinerja Tahun 2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TAR GET	REALISAS I	CAPAIAN	KATEGORI	SUMBER DATA
					%		
1	Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan dan investasi terhadap ekonomi daerah	Persentase pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,1	2,14	101,9	Sangat Baik	BPS

Capaian kontribusi PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Tahun 2023 sebesar 101,9% dengan target pertumbuhan sebesar 2,1% tercapai sebesar 2,14%. Nilai kontribusi PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Tahun 2023 ini dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang.

Pertumbuhan PDRB sektor sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Tahun 2023 sebesar 2,14% dan 1,67% pada tahun 2022. Nilai ini didukung oleh tiga sektor yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan.

Tabel 3.3

Perbandingan target, realisasi dan capaian tujuan
Tahun 2021, 2022 dan 2023

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Unggulan dan Investasi Terhadap Ekonomi Daerah	Persentase pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	na	0,65	Na	1,9	1,67	87,9	2,1	2,14	101,9

Capaian indikator tahun 2021 tidak bisa dijadikan bahan pembandingan karena pada awal penetapan RPJMD belum tercantum nilai awal PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami pertumbuhan yang cukup besar, dengan capaian tahun 2022 sebesar 1,67% dan naik sebesar 2,14% pada tahun 2023. Indikator pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan digunakan sebagai indikator kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023.

Tabel 3.4

Perbandingan target, realisasi dan Daerah Tahun 2023
dengan target akhir RPJMD

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	%CAPAIAN 2023	TARGET AKHIR 2026	TINGKAT KEMAJUAN
1	Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan dan investasi terhadap ekonomi daerah	Persentase pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,14	2,7	79,26

Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026, maka kontribusi PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan telah mencapai 79,26% dari target sebesar 2,7%. Untuk dapat mewujudkan target akhir RPJMD, perlu upaya strategis di sektor kelautan dan perikanan dengan meningkatkan produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya dan produksi olahan perikanan serta menjaga kelestarian ekosistem kelautan dan perikanan untuk meningkatkan daya dukung lingkungan.

Tabel 3.5

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan dan investasi terhadap ekonomi daerah	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,1%	2,14%	102%	15.286.252.37	13.764.499.47	90,04	1

Akuntabilitas keuangan termasuk aspek akuntabilitas manajerial dengan fokus pada efisiensi pengalokasian dana pada kegiatan yang dilaksanakan. Dari tabel 3.5 dapat dihitung efisiensi sesuai standart dengan formula sebagai berikut:

$$100 \% \quad - \quad \frac{\text{Rencana Biaya} \times 100\%}{\text{Realisasi Biaya}}$$

Efisiensi pengalokasian anggaran dari formula perhitungan diatas menghasilkan nilai efisiensi sebesar 1%.

Anggaran tersebut digunakan untuk beberapa program yang mendukung tercapainya tujuan meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan dan investasi terhadap daerah. Adapun program dan kegiatan tersebut tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 3.6
Program dan Indikator Penunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	%	Program	Indikator Kinerja	%	Menunjang / Tidak Menunjang
			Capaian			Capaian	
	Tujuan :						
1	Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Unggulan Dan Investasi Terhadap Ekonomi Daerah Sasaran:	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	79,26	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	-0,73	Menunjang
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	-10,29	Menunjang
	Meningkatkan Produksi Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	-3,49	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan	0,55	Menunjang

Dari tabel diatas capaian produksi perikanan lebih rendah dari target disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- Pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan mengharuskan kapal penangkap ikan yang semua menggunakan jaring cantrang dialihkan menjadi jaring tarik berkantong, sehingga harus merubah surat perijinan dan jenis alat tangkap.
- Proses penerbitan izin dan penggantian alat tangkap tersebut sempat memakan waktu sampai dengan bulan maret 2023. Dalam kurun waktu tersebut kapal dengan alat tangkap cantrang tidak beroperasi melakukan penangkapan, sehingga sangat berdampak terhadap menurunnya produksi perikanan tangkap di Kabupaten Rembang.
- Selain karena hal tersebut diatas, menurunnya produksi perikanan tangkap disebabkan oleh berkurangnya aktivitas penangkapan ikan di laut karena adanya kondisi cuaca yang buruk yaitu musim gelombang yang terjadi cukup lama (musim

barat) disertai dengan angin kencang hal ini menjadikan nelayan tidak berani melaut karena berisiko tinggi. Adanya dampak turunnya daya beli masyarakat terhadap produk perikanan karena adanya kenaikan harga BBM. Dampak yang paling dirasakan oleh pelaku usaha perikanan tangkap seperti nelayan dan pemasar produk perikanan tangkap yaitu harga ikan yang mengalami penurunan, biaya operasional yang semakin tinggi, hasil perikanan tangkap yang sulit untuk dijual karena terbatasnya akses transportasi.

- d. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur memaksa pemilik kapal untuk melaksanakan penangkapan sesuai dengan jalur dan sesuai dengan kuota yang telah diberikan sehingga menyebabkan penurunan jumlah tangkapan dibandingkan sebelum adanya peraturan tersebut.
- e. Terbitnya peraturan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan yang berasal Dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan yang menyebutkan adanya pemungutan penerimaan negara bukan pajak yang dipungut pasca produksi membuat banyak pelaku usaha perikanan menghentikan sementara kegiatan produksinya karena menganggap pemungutan PNBP tersebut membebani mereka karena besarnya nilai presentase pungutan.
- f. Terbitnya Peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 140 tahun 2023 tentang harga acuan ikan yang secara umum terlalu tinggi dibandingkan dengan kondisi harga asli di lapangan menyebabkan besarnya pungutan PNBP Pasca Produksi perikanan, karena pungutan PNBP Pasca Produksi tersebut didasarkan atas hasil tangkapan dan menggunakan acuan harga patokan yang ditetapkan oleh kementerian kelautan dan perikanan.
- g. Pengaruh adanya krisis global perang rusia dan ukraina menyebabkan penurunan permintaan ekspor hasil pengolahan perikanan dan ikan segar sehingga menyebabkan penurunan

permintaan bahan baku industri pengolahan perikanan serta penurunan ekspor ikan segar ke luar negeri. Penurunan permintaan ekspor tersebut menyebabkan harga ikan di pasaran menurun secara drastis, kondisi tidak terserapnya hasil tangkapan tersebut bersamaan dengan bertiupnya angin muson timur (musim timuran) dimana kondisi perairan stabil dan melimpahnya hasil tangkapan semakin menurunkan nilai jual hasil tangkapan.

- h. Kondisi overfishing dan degradasi lingkungan di perairan laut Jawa menyebabkan produksi perikanan tangkap secara umum menurun.
- i. Fenomena El Nino yang menyebabkan perubahan cuaca ekstrem di Indonesia menyebabkan penurunan nilai produksi budidaya perikanan di tahun 2023. Selain fenomena El Nino pengaruh tingginya biaya produksi karena naiknya harga pakan menyebabkan menurunnya jumlah pendapatan pembudidaya. Faktor krisis global juga menurunkan nilai jual udang ekspor sehingga banyak pembudidaya menutup usahanya.
- j. Dampak pasca pandemi covid 19 secara umum telah menyebabkan banyak perusahaan pengolahan hasil perikanan gulung tikar. Beberapa perusahaan pengolahan di Kabupaten Rembang sudah tidak mampu lagi memproduksi pasca pandemi COVID 19. Tutupnya perusahaan pengolahan di kabupaten rembang berdampak besar terhadap penurunan produksi pengolahan hasil perikanan.
- k. Sektor perikanan budidaya perikanan mulai periode semester 2 tahun 2022 mengalami wabah penyakit terutama budidaya udang vanamei. Wabah yang menyerang pada tahun 2023 adalah Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND), sering dikaitkan atau disamakan juga dengan *Early Mortality Syndrome* (EMS). Udang mengalami kematian pada H+10 setelah tebar benih, menyebabkan pembudidaya di Kabupaten Rembang banyak yang menghentikan produksinya selama hampir 1 tahun. Data dukung berupa hasil pemeriksaan laboratorium sebagaimana terlampir.

Berbagai upaya nyata telah dilakukan untuk mengantisipasi menurunnya produksi perikanan di Kabupaten Rembang. Beberapa langkah yang telah diupayakan antara lain:

1. Dinas Kelautan dan perikanan telah melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk Mendorong percepatan proses penerbitan izin dan penggantian alat tangkap atas diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan;
2. Dinas Kelautan dan Perikanan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan kapasitas nelayan, pembudidaya dan pengolah serta pemasar melalui kegiatan pembinaan rutin sinergi dengan penyuluh perikanan Kementerian Kelautan Dan Perikanan;
3. Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pendampingan rutin kepada pelaku utama kelautan dan perikanan dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk pengembangan usahanya;
4. Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pendampingan terhadap akses permodalan bersinergi dengan pendamping LPMUKP Kementerian Kelautan dan Perikanan
5. Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pendampingan dan pemantauan kesehatan lingkungan dan benih budidaya melalui BKIPM (Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan) Semarang serta Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (BLPKIL)
6. Penerbitan rekomendasi BBM bersubsidi bagi nelayan kecil, pembudidaya dan pengolah produk kelautan dan perikanan.

Adapun kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang pada Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel 3.7 sebagai berikut:

Tabel 3. 7
Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan
Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kabupaten Rembang Tahun 2023

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KEUANGAN (%)	EFISIENSI ANGGARAN (%)
					15.286.252.372	13.662.479.474	89,38	10,62
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM OPD DINLUKCAN	75,5	77,5	102,65	7.805.822.272	7.508.323.987	96,19	3,81
	Nilai SAKIP OPD DINLUKCAN	71,5		0,00				100,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	85	85	100,00	11.480.000	11.380.000	99,13	0,87
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	100,00	11.480.000	11.380.000	99,13	0,87
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	85	85	100,00	3.503.288.372	3.339.091.405	95,31	4,69
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34	34	100,00	3.344.408.372	3.259.651.405	97,47	2,53
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5	5	100,00	158.880.000	79.440.000	50,00	50,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	% Dokumen Penatausahaan BMD Dengan Kualitas Baik	85	85	100,00	1.375.000	1300000	94,55	5,45
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	2	100,00	1.375.000	1.300.000	94,55	5,45
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%pengadministrasian layanan Kepegawaian	80	80	100,00	1.200.000	1200000	100,00	-
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2	2	100,00	1.200.000	1200000	100,00	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	% pemenuhan pelayanan umum	100	100	100,00	124.146.100	105281040	84,80	15,20
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12	100,00	1.676.100	1.176.100	70,17	29,83
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	100,00	10.500.000	9.285.145	88,43	11,57
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	12	100,00	3.470.000	2.422.000	69,80	30,20
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	100,00	20.000.000	14.822.000	74,11	25,89
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	100,00	6.000.000	2.890.500	48,18	51,83
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	360	360	100,00	8.200.000	6.330.000	77,20	22,80

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KEUANGAN (%)	EFISIENSI ANGGARAN (%)
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	12	100,00	15.300.000	15.046.000	98,34	1,66
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300	325	108,33	59.000.000	53.309.295	90,35	9,65
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Pelayanan Penunjang Perkantoran	100	100	100,00	4.099.827.000	4013963340	97,91	2,09
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	60	100,00	7.950.000	7.431.000	93,47	6,53
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	36	100,00	98.780.000	90.455.340	91,57	8,43
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	36	100,00	3.993.097.000	3.916.077.000	98,07	1,93
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	85	85	100,00	64.505.800	47488202	73,62	26,38
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	74	74	100,00	42.905.800	33.405.202	77,86	22,14
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100	10	10,00	500.000	500.000	100,00	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	6	40,00	6.100.000	2.860.000	46,89	53,11
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	4	100,00	15.000.000	10.723.000	71,49	28,51
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pertumbuhan Produksi perikanan tangkap	0,5	-10,29	-2.058,00	5.373.533.100	4.294.141.287	79,91	20,09
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	% Sarana dan prasarana perikanan tangkap dalam kondisi baik	25	25	100,00	4.225.000.000	3217906000	76,16	23,84
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	10	8	80,00	495.000.000	297.906.000	60,18	39,82
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	50	50	100,00	3.730.000.000	2.920.000.000	78,28	21,72
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pertumbuhan Kelas Kelompok Nelayan	9,74	9,74	100,00	681.678.500	648.375.000	95,11	4,89
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	35	50	142,86	644.512.000	616.337.000	95,63	4,37
Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	40	75	187,50	37.166.500	32.038.000	86,20	13,80
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Kenaikan Nilai raman (Rp)	0,5	- 931.389.648	#####	466.854.600	427860287	91,65	8,35

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KEUANGAN (%)	EFISIENSI ANGGARAN (%)
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	2	2	100,00	466.854.600	427860287	91,65	8,35
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pertumbuhan produksi perikanan budidaya	1,25	-0,73	-58,40	886.805.000	806.583.200	90,95	9,05
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	% Kenaikan Kelas Pokdakan, Kugar	1,25	1,5	120,00	12.000.000	10.378.200	86,49	13,52
Pelaksanaan Bantuan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	14	14	100,00	12.000.000	10.378.200	86,49	13,52
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	% prasarana pembudidayaan ikan dan garam dalam kondisi baik	25	30	120,00	874.805.000	796.205.000	91,02	8,98
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6	14	233,33	865.000.000	786.400.000	90,91	9,09
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	10	10	100,00	9.805.000	9.805.000	100,00	-
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Pertumbuhan Produksi Hasil Olahan Perikanan	1,25	0,55	44,00	1.220.092.000	1.144.071.000	93,77	6,23
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Persentase cakupan Data Pengolahan Perikanan	85	88	103,53	1.394.500	1.354.000	97,10	2,90
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	2	3	150,00	1.394.500	1.354.000	97,10	2,90
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah produk pengolahan perikanan yang bersertifikat	18	20	111,11	124.134.000	118.776.000	95,68	4,32
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	50	50	100,00	124.134.000	118.776.000	95,68	4,32
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Angka Konsumsi Ikan	43,7	42,97	98,33	1.094.563.500	1.023.941.000	93,55	6,45

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KEUANGAN (%)	EFISIENSI ANGGARAN (%)
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	43,7	42,97	98,33	93.237.000	90.640.000	97,21	2,79
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	136	136	100,00	1.001.326.500	933.301.000	93,21	6,79

Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2023 melaksanakan 4 program dengan 5 indikator. Dari 5 indikator tersebut sebanyak 3 indikator masih berada dibawah target dan 2 indikator mencapai target, secara lengkap dapat disampaikan analisa capaian indikator prgram sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;

Program Pengelolaan Perikanan tangkap dengan indikator presentase produksi perikanan tangkap target 0,5% dengan realisasi -10,29% dengan capaian kinerja sebesar -2.058 %. Pada Tahun 2023 produksi perikanan tangkap sebesar 79.808.441 ton dan menurun sebesar 9.156.441 ton dari sebelumnya sebesar 88.964.970 ton. Tidak tercapainya peningkatan produksi perikanan tangkap disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan mengharuskan kapal penangkap ikan yang semua menggunakan jaring cantrang dialihkan menjadi jaring tarik berkantong, sehingga harus merubah surat perijinan dan jenis alat tangkap.
- b. Proses penerbitan izin dan penggantian alat tangkap tersebut sempat memakan waktu sampai dengan bulan maret 2023. Dalam kurun waktu tersebut kapal dengan alat tangkap cantrang tidak beroperasi melakukan penangkapan, sehingga sangat berdampak terhadap menurunnya produksi perikanan tangkap di Kabupaten Rembang.

- c. Selain karena hal tersebut diatas, menurunnya produksi perikanan tangkap disebabkan oleh berkurangnya aktivitas penangkapan ikan di laut karena adanya kondisi cuaca yang buruk yaitu musim gelombang yang terjadi cukup lama (musim barat) disertai dengan angin kencang hal ini menjadikan nelayan tidak berani melaut karena berisiko tinggi. Adanya dampak turunnya daya beli masyarakat terhadap produk perikanan karena adanya kenaikan harga BBM. Dampak yang paling dirasakan oleh pelaku usaha perikanan tangkap seperti nelayan dan pemasar produk perikanan tangkap yaitu harga ikan yang mengalami penurunan, biaya operasional yang semakin tinggi, hasil perikanan tangkap yang sulit untuk dijual karena terbatasnya akses transportasi. Menyikapi hal ini telah dilakukan pemberian bantuan sosial penanganan dampak kenaikan harga BBM kepada nelayan agar tetap dapat melaksanakan kegiatan penangkapan ikan,
- d. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur memaksa pemilik kapal untuk melaksanakan penangkapan sesuai dengan jalur dan sesuai dengan kuota yang telah diberikan sehingga menyebabkan penurunan jumlah tangkapan dibandingkan sebelum adanya peraturan tersebut.
- e. Terbitnya peraturan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan yang berasal Dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan yang menyebutkan adanya pemungutan penerimaan negara bukan pajak yang dipungut pasca produksi membuat banyak pelaku usaha perikanan menghentikan sementara kegiatan produksinya karena menganggap pemungutan PNBP tersebut membebani mereka karena besarnya nilai presentase pungutan.
- f. Terbitnya Peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 140 tahun 2023 tentang harga acuan ikan yang secara umum terlalu tinggi dibandingkan dengan kondisi harga asli di lapangan menyebabkan besarnya pungutan PNBP Pasca Produksi perikanan, karena pungutan PNBP Pasca Produksi tersebut

didasarkan atas hasil tangkapan dan menggunakan acuan harga patokan yang ditetapkan oleh kementerian kelautan dan perikanan.

- g. Pengaruh adanya krisis global perang rusia dan ukraina menyebabkan penurunan permintaan ekspor hasil pengolahan perikanan dan ikan segar sehingga menyebabkan penurunan permintaan bahan baku industri pengolahan perikanan serta penurunan ekspor ikan segar ke luar negeri. Penurunan permintaan ekspor tersebut menyebabkan harga ikan di pasaran menurun secara drastis, kondisi tidak terserapnya hasil tangkapan tersebut bersamaan dengan bertiupnya angin muson timur (musim timuran) dimana kondisi perairan stabil dan melimpahnya hasil tangkapan semakin menurunkan nilai jual hasil tangkapan.
- h. Kondisi overfishing dan degradasi lingkungan di perairan laut jawa menyebabkan produksi perikanan tangkap secara umum menurun.

2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan indikator presentase peningkatan produksi perikanan budidaya dengan target 1,25% terealisasi -0,73% dengan capaian kinerja sebesar -58,40%. Pada tahun 2022 produksi budidaya sebesar 6.605.734 kg menurun sebesar 82.572 kg menjadi 6.557.774 kg.

Menurunnya produksi perikanan budidaya pada tahun 2023 disebabkan beberapa hal antara lain Fenomena El Nino yang menyebabkan perubahan cuaca ekstrem di Indonesia menyebabkan penurunan nilai produksi budidaya perikanan di tahun 2023. Selain fenomena El Nino pengaruh tingginya biaya produksi karena naiknya harga pakan menyebabkan menurunnya jumlah pendapatan pembudidaya. Faktor krisis global juga menurunkan nilai jual udang ekspor sehingga banyak pembudidaya menutup usahanya.

Sektor budidaya perikanan mulai periode semester 2 tahun 2022 mengalami wabah penyakit terutama budidaya udang vanamei. Wabah yang menyerang pada tahun 2023 adalah Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND), sering dikaitkan atau

disamakan juga dengan *Early Mortality Syndrome* (EMS). Udang mengalami kematian pada H+10 setelah tebar benih, menyebabkan pembudidaya di Kabupaten Rembang banyak yang menghentikan produksinya selama hampir 1 tahun. Data dukung berupa hasil pemeriksaan laboratorium sebagaimana terlampir.

3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, dengan indikator persentase peningkatan produksi hasil olahan ikan target 1,25% terealisasi sebesar 0,55%. Produksi Olahan Hasil Perikanan Pada Tahun 2023 sebesar 131.213.739,5 naik sebesar 714.495 kg dari tahun 2022 yang jumlahnya sebesar 130.499.245 kg Realisasi 0,55% dengan capaian kinerja sebesar 93,77%.

Kinerja program belum tercapai dikarenakan Selain itu dampak pasca pandemi covid 19 secara umum telah menyebabkan banyak perusahaan pengolahan hasil perikanan gulung tikar. Ada beberapa perusahaan pengolahan di Kabupaten Rembang sudah tidak mampu lagi memproduksi pasca pandemi COVID 19. Tutupnya perusahaan pengolahan di kabupaten rembang berdampak besar terhadap penurunan produksi pengolahan hasil perikanan. Selain karena dampak pasca covid 19, menurunnya ketersediaan stok ikan hasil tangkapan menyebabkan harga ikan naik sehingga proses produksi pengolahan terdampak.

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD target 100 realisasi 100

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang, pada tahun anggaran 2023, di dukung dengan Anggaran Pendapatan sebesar Rp. 15.500.000.000,- dan anggaran Belanja APBD sebesar Rp. 15.286.252.372,- dengan komposisi sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan:

Retribusi Penyedia Tempat Pelelangan	:Rp.14.780.000.000,-
Retribusi Penyedia Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan	:Rp. 680.000.000,-
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	:Rp. 40.000.000,-

Realisasi Pendapatan 2023:

Retribusi Penyedia Tempat Pelelangan :Rp.8.496.256.620,50,-
Retribusi Penyedia Fasilitas Lainnya :Rp. 154.993.000,-
di Tempat Pelelangan
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah :Rp. 10.050.000,-

Anggaran Belanja:

Belanja Operasi : Rp. 14.618.740.372,-
Belanja Modal : Rp. 667.512.000,-

Realisasi Belanja 2023:

Belanja Operasi : Rp. 12.489.875.474,-
Belanja Modal : Rp. 637.312.000,-

Tabel 3.8

Realisas Anggaran Program dan Kegiatan
Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023

No	Program Dan Anggaran	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.805.822.272	7.519.703.987	96,33
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.480.000	11.380.000	99,13
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.480.000	11.380.000	99,13
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.503.288.372	3.339.091.405	95,31
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.344.408.372	3.259.651.405	97,47
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	158.880.000	79.440.000	50,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.375.000	1.300.000	94,55
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.375.000	1.300.000	94,55
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.200.000	1.200.000	100,00
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.200.000	1.200.000	100,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	124.146.100	105.281.040	84,80
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.676.100	1.176.100	70,17
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.500.000	9.285.145	88,43
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.470.000	2.422.000	69,80
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	14.822.000	74,11
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.000.000	2.890.500	48,18
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.200.000	6.330.000	77,20

No	Program Dan Anggaran	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	Penyediaan Bahan/Material	15.300.000	15.046.000	98,34
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.000.000	53.309.295	90,35
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.099.827.000	4013963340	97,91
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.950.000	7.431.000	93,47
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	98.780.000	90.455.340	91,57
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.993.097.000	3.916.077.000	98,07
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.505.800	47.488.202	73,62
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.905.800	33.405.202	77,86
	Pemeliharaan Mebel	500.000	500.000	100,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.100.000	2.860.000	46,89
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000	10.723.000	71,49
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	5.373.533.100	4.294.141.287	79,91
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	4.225.000.000	3.217.906.000	76,16
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	495.000.000	297.906.000	60,18
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	3.730.000.000	2.920.000.000	78,28
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	681.678.500	648.375.000	95,11
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	644.512.000	616.337.000	95,63
	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	37.166.500	32.038.000	86,20
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	466.854.600	427.860.287	91,65
	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	466.854.600	427.860.287	91,65
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	886.8605.000	806.583.200	90,95
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	12.000.000	10.378.200	86,49
	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	12.000.000	10.378.200	86,49
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	874.805.000	796.205.000	91,02
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	865.000.000	786.400.000	90,91
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.805.000	9.805.000	100,00
4	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.220.092.000	1.144.071.000	93,77

No	Program Dan Anggaran	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	1.394.500	1.354.000	97,10
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.394.500	1.354.000	97,10
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Pemasaran bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	124.134.000	118.776.000	95,68
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	124.134.000	118.776.000	95,68
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.094.563.500	1.023.941.000	93,55
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	93.237.000	90.640.000	97,21
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.001.326.500	933.301.000	93,21
TOTAL		15.286.252.372	13.764.499.474	90,04

Dari total anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 15.286.252.372,- digunakan untuk membiayai 4 Program dan 15 Kegiatan untuk mendukung tercapainya kinerja Dinas Kelautan Dan Perikanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Tahun 2023 sebesar 90,04% atau terealisasi sebesar Rp. 13.764.499.474,- dengan realisasi fisik 98%.

Anggaran belanja langsung tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp.4.642.868.628,- dibanding tahun 2022 sebesar Rp. 19.929.121.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 18.556.326.449,-. Prosentase realisasi anggaran pada tahun 2023 juga mengalami penurunan sebesar 3,07 % dari tahun sebelumnya yang mencapai realisasi sebesar 93,11 %.

Dari 4 program yang dilakukan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang capaian realisasi anggaran dibawah 90% adalah Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan realisasi sebesar 4.294.141.287 dari total anggaran sebesar 5.373.533.100 atau kinerja anggaran sebesar 79,91%, sub kegiatan yang mencapai

realisasi terendah adalah sub kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang terealisasi sebesar 60,18% hal ini terjadi karena pekerjaan hibah barang berupa pembangunan tambatan perahu tidak dilaksanakan karena belum ada izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut sehingga pekerjaan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Untuk kegiatan lainnya terlaksana sesuai rencana.

Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap terealisasi sebesar 78,28% karena ada pekerjaan hibah uang untuk peningkatan sarana nelayan kecil yang tidak terealisasi. Hibah uang tersebut tidak terlaksana untuk 23 kelompok karena setelah dilakukan verifikasi ke lapangan kelompok tersebut tidak mampu mencukupi persyaratan yang telah ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara umum sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2023 tidak dapat dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang. Kondisi ini tidak dapat diatasi karena berada di luar kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang, hal ini berkaitan dengan kebijakan yang diterapkan oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan. Berbagai upaya telah dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang untuk merealisasikan target yang telah ditetapkan.

4.2 Strategi Untuk Meningkatkan Kinerja

Secara ringkas seluruh capaian kinerja pada tahun 2023 telah memberikan arah bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang untuk meningkatkan kinerjanya pada masa selanjutnya secara berkesinambungan. Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja 2023, dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan di masa selanjutnya sebagai berikut :

1. pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap;
2. Pemberdayaan usaha perikanan tangkap skala kecil
3. Pengembangan sarana dan prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
4. Pengembangan kartu KUSUKA yang terintegrasi dengan sistem database;
5. Pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan melalui Peningkatan peningkatan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, dan peningkatan kerjasama antar daerah dan antar sektoral;

6. peningkatan kemampuan teknis pembudidaya ikan, terutama penerapan Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPIB);
7. Intensifikasi budidaya ikan air payau dan tawar;
8. Pengembangan kawasan budidaya vanamei;
9. pemenuhan jaminan mutu, keamanan benih dan induk ikan dan lingkungan budidaya yang kondusif;
10. pemberian akses dan pembinaan untuk pencapaian Seritikat Kelayakan Pengolahan (SKP) atau sertifikat yang diberikan kepada Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang telah menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik / GMP (*Good Manufacturing Practices*) dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Sanitasi Standar (*Standar Sanitation Operating Procedure (SSOP)*);
11. Pengembangan usaha produksi garam melalui integrasi lahan, penerapan teknologi dan tata kelola logistik garam;

4.3 Inovasi Yang Dilakukan

1. Mengaktifkan penggunaan CMS (*Cash Managemnet System*) dalam proses lelang di semua TPI, karena sejak tahun 2016 sistem tersebut hanya berjalan di TPI Tasikagung 1;
2. Mengembangkan aplikasi SIPARI untuk memantau jumlah kapal dan nelayan kecil serta produksinya serta memantau penyaluran BBM bersubsidi untuk pelaku utama perikanan;

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Tahun 2023. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan / evaluasi untuk kinerja selanjutnya.

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG


DINILAI
Dr. MOCH SOFYAN CHOLID
Pembina Tk. 1
NIP. 196607291993031004

L A M P I R A N



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Pemuda Nomor 82 Telp 0295 6980197

Website: dinlutkan.rembangkab.go.id email: dinlutkan@rembangkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
(PERUBAHAN)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ir. MOCHAMAD SOFYAN CHOLID
Jabatan : Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I
Jabatan : Bupati Rembang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 01 November 2023

PIHAK KEDUA,



H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

PIHAK PERTAMA,



Ir. MOCHAMAD SOFYAN CHOLID
Pembina Utama Muda
NIP 196607291993031004

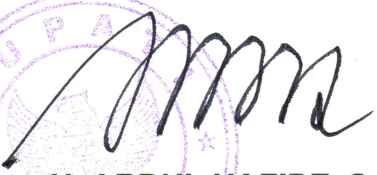
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG
(PERUBAHAN)

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Tujuan		
1.1	Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan dan investasi terhadap ekonomi daerah	Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,1%
2.	Sasaran		
2.1	Meningkatnya produksi perikanan	Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan	1%
3.	Direktif Pimpinan		
3.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Nilai SAKIP OPD	71
3.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik OPD	Nilai IKM OPD	75

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.805.822.272	DAU
2.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	5.373.533.100	DAU, DAK
3.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	886.805.000	DAU, DAK
4.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.220.092.000	DAU, DAK

Rembang, 01 November 2023

BUPATI REMBANG


H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG


Ir. MOCHAMAD SOFYAN CHOLID
Pembina Utama Muda
NIP 196607291993031004